

SOSIALISASI POLITIK DAN BUDAYA POLITIK

KONSEP SOSIALISASI POLITIK

Konsep tentang sosialisasi politik, sangat beragam, karena banyaknya perspektif yang digunakan. Berikut ini dikemukakan beberapa konsep sosialisasi politik.

1. Easton dan Dennis, memberikan pengertian sosialisasi politik dari perspektif proses. Mereka menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses pengembangan lewat mana seseorang memperoleh orientasi politik ("those of developmental processes through which persons acquire political orientation") (Renshon,1977:4).
2. Kennet P. Langton (1969:4), mengartikan sosialisasi politik dalam arti yang luas. Ia menyatakan bahwa sosialisasi politik merupakan cara bagaimana masyarakat mentransmisikan budaya politik dari suatu generasi ke generasi yang lain (" Political socialization, in broadest sense,refers to the way society transmits its political culture from generation to generation") .
3. Dawson dan Prewitt's, melihat sosialisasi politik sebagai proses dan hasil. Ia mengemukakan sosialisasi politik sebagai proses pengembangan lewat mana seseorang warga negara menjadi matang secara politik ("the developmental process through which the citizen matures politically") (Renshon,1977:4).
4. Definisi yang didasarkan dari perspektif sistem . Dari perpektif system , sosialisasi politik dapat didefinisikan sebagai proses lewat mana warga negara memperoleh pandangan-pandangan politik yang merupakan sekumpulan cara yang telah menjadi pegangan bagi kehidupan politik bangsanya (Prewitt & Dawson,1977:14).

Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasionalnya.

TEORI SOSIALISASI POLITIK

1. Dilihat pada level warga negara secara individual paling tidak dikenal:
 - system theory, dan
 - hegemonic theory (Prewitt & Dawson, 1977:17).
2. Dilihat dari aspek pola-pola belajar politik yang terkait dengan perkembangan sosial dan pribadi :
 - Psychodynamic Theory;
 - Social learning theory;
 - Cognitive Developmental Theory (Prewitt & Dawson,1977:68-70).

TIBE TIBE SOSIALISASI POLITIK

1. Indirect political socialization :
 - Interpersonal transference,
 - Apprenticeship,
 - Generalization.
2. Direct political socialization:
 - Imitation,
 - Anticipatory Socialization,
 - Political education,
 - Political experience.

BUDAYA POLITIK

1. Budaya politik adalah orientasi kognitif, afektif dan evaluatif terhadap sistem politik (Almond dan Verba, 1984:16).
2. Almond dan Verba (1984) menggolongkan tipe budaya politik menjadi:
 - budaya politik partisipan;
 - budaya politik subjek;
 - budaya politik parokial.

Tipe budaya politik tersebut terbentuk oleh orientasi politik:

ORIENTASI POLITIK	BUDAYA POLITIK PAROKIAL	BUDAYA POLITIK SUBJEKTIF	BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
Kognitif	xxx		
Afektif		xxx	
Evaluatif			xxx

Ket. xxx : dominan

Atau dapat digambarkan sebagai berikut:

BUDAYA POLITIK	SISTEM POLITIK SECARA UMUM	INPUT	OUT-PUT	PERAN DIRI
Parokial	-	-	-	-
Subjektif	-	-	x	-
Partisipan	x	x	x	x

3. Almond dan Verba (1984) menyatakan bahwa kebudayaan politik suatu bangsa dalam kenyataannya merupakan budaya politik campuran. Maksudnya tidak akan ditemukan dalam kenyataan empirik bahwa suatu bangsa hanya memiliki satu jenis kebudayaan politik saja. Budaya politik campuran yang bersifat proporsional

merupakan budaya demokratis yang dikenal sebagai budaya keawraganegaraan (*civic culture*).

4. Bagaimana tentang budaya politik di Indonesia ?
Kuntowijoyo (199:62-64) menyatakan ada 2 pusaka budaya politik bangsa yaitu budaya afirmatif (penguah kekuasaan) yang feodalistik yang merupakan tradisi politik BU (Budi Utomo) dan budaya politik *critical* (pemawas terhadap kekuasaan) yang demokratis sebagai tradisi politik SI (Serikat Islam)". Dan Nurcholis Madjid dalam hal ini "menggolongkan budaya pedalaman yang feodalistik dan budaya pesisir yang demokratis" (Harian Republika, edisi 3 September 1996).

Pendapat lain menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki akar budaya politik demokratis. Karena akar budaya politik Indonesia adalah feodalistik (pengaruh kultur Jawa); kapitalistik – birokratik (pengaruh kolonial Belanda) dan militeristik (pengaruh fasisme Jepang).

5. Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, sudah barang tentu yang hendak disosialisasikan adalah budaya politik kewarganegaraan (*civic culture*) atau budaya politik demokrasi. Seperti dinyatakan Alexis de Tocqueville " *Democracy in America is successful because of a participatory culture and a belief in equality*". Lipset, dalam hal ini membandingkan budaya Kanada dengan AS. *Canadian culture is more statist, deferential to leaders, collectivist and conservative. US is more independent, distrustful of government, individualistic, liberal and progressive.*
6. Apabila isi sosialisasi budaya demokrasi berjalan secara efektif, maka akan terjadi konsolidasi demokrasi yang sangat penting bagi berkembangnya masyarakat madani (*civil society*).
7. Negara demokrasi yang berbasis *civil society* inilah yang merupakan muara dari seluruh proses politik yang semestinya berkembang dalam era reformasi ini.

Lebih jauh baca :

1. Almond, Gabriel A.; Verba, Sidney (1984). *Budaya Politik*, Jakarta : Bina Aksara.
2. Diamond. Larry (1999). *Developing Democracy Toward Consolidation*, Yogyakarta : IRE. (khususnya baca : p.205-275 tentang budaya politik),
3. Cholisin, 1998, Budaya Politik Indonesia, Jurnal Cakrawala Pendidikan, Th.XVII, Jilid 1 No.1., IKIP Yogyakarta.
4. Stephen Fisher, Political Culture, <http://malroy.econ.....>